

Komodifikasi Agama dalam Ruang Politik di Seberang Kota Jambi

Religion Commodification in Political Activities in Seberang Kota Jambi

Abdul Malik & Ariyandi Batubara

Dosen IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Jl. Jambi-Ma. Bulian KM 16, Simpang Sungai Duren, Muaro Jambi, Jambi

Email: batubaraariyandi@rocketmail.com

Abstrak: Agama dalam konsep ideal dipahami sebagai panduan ukuran moral. Agama adalah cara hidup yang memiliki doktrin dengan makna universal dan melintasi ruang dan waktu selalu relevan dalam semua konteks, termasuk politik. Tapi perspektif ini pada situasi nyata menyimpang. Agama saat ini bergeser dari posisinya sebagai pembimbing menjadi hanya instrumen dan dapat dipahami dengan fleksibel sesuai dengan pemahaman orang yang mengeksploitasi agama itu sendiri. Penelitian ini ingin mencari jawaban (1) apa motivasi agama dimasukkan ke dalam ruang politik di Seberang Kota Jambi, (2) bagaimana jenis komodifikasi agama dalam ruang politik di Seberang Kota Jambi, dan (3) apa implikasi dari fenomena komodifikasi agama dalam ruang politik di Seberang Kota Jambi. Dengan menggunakan data dari observasi, wawancara, dan dokumentasi, penelitian ini menemukan (1) motivasi mayoritas politisi di Seberang Kota Jambi memasukkan agama ke dalam politik adalah untuk mendapatkan kekuatan, (2) dan bentuk-bentuk komodifikasi agama di ruang politik di Seberang Kota Jambi menggunakan Kitab Yasin sebagai promosi politik, menempatkan simbol-simbol agama dalam spanduk politik, dan menggunakan ulama sebagai instrumen untuk meningkatkan elektabilitas politik. Jika fenomena ini dibiarkan, waktu mendatang akan membawa implikasi dalam pemahaman agama menjadi dangkal dan parsial. Penelitian ini merekomendasikan untuk para pemangku kepentingan politisi, ulama, akademisi, dan masyarakat Seberang Kota Jambi untuk mengambil bagian mereka sendiri dalam politik, sehingga agama dapat dipahami dan dilakukan.

Kata kunci: Komodifikasi Agama, Ruang Politik.

Abstract: Religion in an ideal concept is understood as guide measure of moral. Religion is way of life that have doctrines with universal meanings and cross the space and time along with always relevant to be directed in all context, including politic. But this perspectives on the real situation was deviate. So, today, religion was shifted from its position as guidliness become only instrument and can be understood with flexible according to person comprehension who exploitation the religion it self. This research want to find answer (1) what is motivation religion put into politic space on Seberang Kota Jambi, (2) how kinds of religion commodification in politic space on Seberang Kota Jambi, and (3) what is implication from the religion commodification phenomenon in politic space on Seberang Kota Jambi. By using the data that takes from observation, interview, and documentation, this research found (1) the motivation of majority politicians on Seberang Kota Jambi put religion into politic pace is to get a power, (2) and the forms of religion commodofication in politic space on Seberang Kota Jambi are using Kitab Yāsīn as politic promotion, put religion symbols into politic banner, and using ulama as instrument for increasing politic electability, etc. If this phenomenon

allowed as well as, so in future time will bring (3) implication in understanding of religion become superficial and partial. This research is recommended to stakeholders as politicians, ulama, academics, and people of Seberang Kota Jambi to take their own part, so that religion can be understood and done.

Keywords: *Religion Commodification, Political Space.*

A. Pendahuluan

Muhammad Abduh dan Burhanuddin Salam menjelaskan bahwa agama berkaitan dengan usaha-usaha manusia untuk mengukur dalamnya makna dari keberadaannya sendiri dan keberadaan alam semesta. Agama juga menjadi pembentukan moral, petunjuk, pegangan, serta pedoman hidup.¹ Ini artinya, bahwa pada tataran teoritis dalam konteks politik, agama sudah seyogyanya berfungsi sebagai pedoman, acuan, atau tuntunan berpolitik. Sehingga dengan demikian, tidak dijumpai atau paling tidak meminialisir kecurangan-kecurangan atau ketidakadilan di dalam perilaku berpolitik kapanpun dan dimanapun, termasuk situasi hubungan politik dan agama di Seberang Kota Jambi itu sendiri.

Peneliti melihat fenomena perpolitikan dewasa ini justeru menampakkan sesuatu yang bertolak belakang, dimana ada kecenderungan agama dan politik saat ini terjadi pertukaran kepentingan semata-mata. Agama dipahami oleh sebagian onum politik hanyalah sebatas instrumen yang menarik untuk “dijual” kepada khalayak hanya demi ambisi politik seperti meraup massa, memperoleh kekuasaan, dan kepentingan-kepentingan politik pragmatis lainnya. Kenyataan ini tentu sudah menggeser fungsi agama yang seharusnya menjadi pedoman bagi etika dalam dunia politik itu sendiri.

Peneliti, berdasarkan *grand tour* di Seberang Kota Jambi, menemukan adanya fenomena-fenomena yang mengarah kepada asumsi atau hipotesa bahwa saat ini telah terjadi komodifikasi agama dalam ruang politik di Seberang Kota Jambi. Temuan-temuan yang telah peneliti dapati di lokasi penelitian melalui *grand tour* tersebut misalnya; pertama, ketika momentum bulan suci Ramadhan, para petinggi partai begitu sering melakukan aktivitas-aktivitas ibadah yang intensitasnya cukup padat. Terlepas apakah kondisi ini dilakukan karena atas dasar intrik politik atau murni sebuah ibadah biasa.² Kedua, peneliti menemukan pula perayaan-perayaan hari besar agama Islam juga dikomodifikasikan seperti kelompok-kelompok pengajian, teks-teks al-Quran sudah menjadi “barang dagangan” politik guna memobilisasi dukungan dari konstituen politik. Baliho-baliho politik juga menampilkan kalimat-kalimat bernuansa keagamaan yang terpajang pula foto ulama lokal (ulama lokal di Seberang Kota Jambi ini lebih populer diistilahkan dengan Tuan Guru) di Seberang Kota Jambi untuk menarik simpati publik.³ Ketiga, peneliti juga menemukan sebuah Kitab *Yâsin* dengan ukuran 15 cm x 10 cm berwarna merah. Pada halaman paling depan Kitab *Yâsin* tersebut tertulis kalimat “Surat *Yâsin* Sumbangan dari (tertulis salah satu nama partai politik)” dengan tulisan mencolok berwarna putih.⁴

Berdasarkan temuan-temuan di atas, peneliti pada akhirnya termotivasi untuk melakukan suatu kajian mendalam tentang fenomena pertukaran kepentingan dan adanya hubungan yang menarik antara agama dan politik yang mengarah kepada hubungan

pertukaran kepentingan. Oleh sebab itu, tulisan ini akan mencoba memahami dan menjelaskan apa yang menjadi dasar rasionalitas terjadinya komodifikasi agama dalam ruang politik di Seberang Kota Jambi tersebut, baik menyangkut motivasi dan latar belakang terjadinya komodifikasi, maupun bentuk-bentuk komodifikasinya, dan implikasinya dalam konteks kekinian.

B. Tinjauan terhadap Konsep Komodifikasi Agama

Komodifikasi secara etimologi diadopsi dari bahasa Inggris, yakni *commodification* yang berasal dari akar kata *commodity* yang artinya adalah *something produced for sale*.⁵ Sariyatna memberikan pendapatnya bahwa komodifikasi berasal dari kata “komoditi” yang berarti barang atau jasa yang bernilai ekonomi dan “modifikasi” yang berarti perubahan fungsi atau bentuk sesuatu. Jadi komodifikasi adalah perubahan nilai maupun fungsi dari suatu barang maupun jasa menjadi komoditi (barang yang bernilai ekonomi).⁶ komodifikasi didefinisikan sebagai proses transformasi menggunakan nilai-nilai hidup yang digunakan manusia menjadi sebuah nilai yang bisa ditukarkan.⁷

Muhammad Fakhruroji menjelaskan bahwa komodifikasi agama adalah transformasi nilai guna agama yang pada mulanya sebagai pedoman hidup dan sumber nilai-nilai normatif yang berlandaskan pada keyakinan ketuhanan menjadi nilai tukar, dengan menggunakan fungsi-fungsinya disesuaikan dengan kebutuhan manusia atas agama.⁸ Sementara itu, Fealy menjelaskan istilah komodifikasi Islam dimaknai sebagai bentuk komersialisasi Islam di mana keimanan dan simbol-simbolnya menjadi hal yang dapat ditransaksikan untuk mendapatkan keuntungan.⁹ Baker berpendapat bahwa komodifikasi agama membuat celah untuk mendefinisikan ulang agama sebagai komoditas pasar untuk dipertukarkan.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa komodifikasi agama adalah suatu diskursus mengenai pertukaran kepentingan. Dimana agama dan simbol-simbol yang melekat padanya dapat dijadikan suatu komoditas yang dapat dipertukarkan guna memperoleh keuntungan-keuntungan bagi pelakunya.

Komodifikasi Agama di Ruang Politik dan Politisasi Agama

Peneliti akan memulai penjelasan ini dari pembicaraan tentang politik terlebih dahulu. Barulah nanti dilanjutkan dengan pembicaraan mengenai perbedaan diantara politisasi agama dan komodifikasi agama dalam ruang politik. Mengingat kedua peristilahan ini sangat dekat, maka dirasakan perlu untuk dilakukan pembedaan, agar semakin terang maksud daripada masing-masing terminologi. Sehingga pembaca dapat semakin jelas menangkap makna dari komodifikasi agama dalam ruang politik yang dimaksud dalam penelitian ini.

Kata politik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki tiga buah pengertian, yaitu:¹¹

1. Pengertian mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan seperti sistem pemerintahan, dasar pemerintahan, atau bersekolah di akademi politik.
2. Segala urusan dan tindakan seperti siasat, kebijakan, dan lain sebagainya mengenai

pemerintahan negara atau terhadap negara lain. Contohnya: politik dalam dan luar negeri, kedua negara itu bekerjasama dalam bidang politik, partai politik, dan organisasi politik.

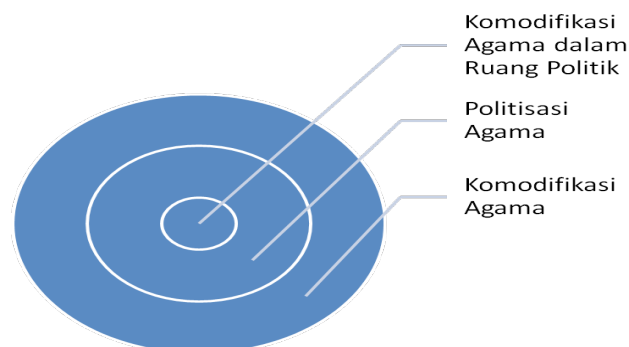
3. Cara bertindak dalam menghadapi atau menanggapi suatu masalah, atau kebijaksanaan. Contohnya: politik dagang, dan politik bahasa nasional.

Kata politik inilah kemudian menurunkan kata-kata yang berkaitan dengannya seperti politikus, politis, politisi, dan politisasi. Sebelum peneliti mengajukan paparan pengertian tentang politisasi, ada baiknya dimulai dahulu dari pengertian politikus, politis, dan politisi. Sebab kata-kata ini juga berkaitan dengan arti politisasi nantinya. Oleh sebab itu mengartikan tiga kata tersebut peneliti anggap sangat penting. Kata politikus, memiliki dua pengertian yaitu: a. Ahli politik atau ahli kenegaraan, dan b. Orang yang berkecimpung dalam dunia politik. Kemudian kata politisi adalah sinonim dengan kata politikus. Sedangkan kata terakhir, politis mengandung pengertian bersifat politik atau bersangkutan dengan politik.¹²

Kata politisasi mengandung pengertian membuat keadaan (perbuatan, gagasan, dan sebagainya) bersifat politis.¹³ Dari pengertian ini, maka kata politisasi diartikan sebagai perbuatan baik berupa gagasan, ide, dan lain sebagainya menjadi bersifat politik. Kalau kata politisasi dikaitkan dengan kata agama, maka, pengertian kata politisasi agama menjadi: suatu perbuatan baik perbuatan itu berupa gagasan, ide, pemahaman dan lain sebagainya yang berkenaan tentang keagamaan menjadi bersifat politik, bukan bersifat keagamaan lagi. Definisi ini secara praktis, oleh aktor atau pihak yang berkepentingan akan menjadikan agama sebagai objek yang dipahami, digagas, dan diidekan, demi sesuatu yang berhubungan dengan politik.

Peneliti sekarang akan membandingkan keduanya. Diawal pembahasan telah diuraikan bahwa komodifikasi agama adalah transformasi nilai guna agama yang pada awalnya sebagai sumber nilai normatif menjadi nilai tukar yang disesuaikan (melalui gagasan, ide, pemahaman) daripada simbol-simbol agama tadi lalu ditransaksikan kepada publik untuk mendapatkan keuntungan. Peneliti menyimpulkan bahwa kata komodifikasi agama lebih umum daripada politisasi agama. Akan tetapi kata komodifikasi agama dalam ruang politik akan lebih khusus daripada kata politisasi agama.

Gambar 1. Ilustrasi Komodifikasi dan Politisasi Agama dari Sudut Aktor



Sumber: Gambar 1 di atas adalah hasil elaborasi peneliti dari tulisan Endang Turmudi dalam buku "Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan"

Dalam gambar 1 diatas, peneliti menyimpulkan bahwa ruang lingkup komodifikasi agama lebih umum daripada politisasi agama sedangkan politisasi agama lebih umum daripada komodifikasi agama dalam ruang politik. Sekarang, peneliti akan menguraikan mengapa sampai berkesimpulan seperti itu. Dalam kasus politisasi agama, aktor yang bermain didominasi oleh elit agama, meskipun tidak menutup kemungkinan dilakukan pula oleh mereka yang tidak dikategorikan kelompok agamawan. Tapi kemungkinan untuk ini sangat kecil. Sedangkan dalam konteks komodifikasi agama, yang bermain disana adalah aktor yang sangat umum. Artinya, siapapun, tanpa tereksklusifikasi oleh latar belakang apapun. Lalu, untuk kasus komodifikasi agama dalam ruang politik, maka aktornya lebih sempit lagi, yaitu mestilah mereka yang berkecimpung dalam dunia politik. Tidak bisa di luar itu. ini perbedaan dari sudut aktor.

Peneliti selanjutnya membedakan dari sudut teknis. Adapun pola politisasi agama adalah: sang aktor dapat memainkan perannya dalam dua hal, yaitu memperdaya atau memberdayakan agama untuk tujuan politis. Sehingga, dengan demikian hasil dari politisasi agama ini secara konkret bisa mengambil bentuk *output* yang positif dan negatif seperti; ulama menjadi pemimpin, menjadikan agama sebagai alat justifikasi politik, pelemahan terhadap politik Islam. Untuk kasus komodifikasi agama dalam ruang politik, maka dalam hal ini, sang aktor dengan berbagai teknisnya, berupaya untuk menjadikan agama (memberdayakan) agama sebagai alat untuk di transaksikan kepada publik untuk kemudian berakhir sebagai alat mencapai kekuasaan. Atau bisa juga, ulama diberdayakan untuk menjadi juru kampanye partai politik tertentu. Untuk lebih jelasnya, peneliti berusaha membuat skema dengan tujuan memberikan gambaran untuk membedakan keduanya (politisasi dan komodifikasi agama) yang memang sangat mirip agar diperoleh kejelasan maksud dari peneliti. Dengan demikian, menjelaskan pula alasan pemilihan dan pertimbangan tulisan ini menggunakan kata komodifikasi agama dalam ruang politik dan bukannya menggunakan kata politisasi agama.

Teori Pertukaran Peter Michael Blau

Teori pertukaran sosial dari Peter Michael Blau muncul pada tahun 1960-an atau abad ke-20 sebagai respon terhadap teori fungsionalis. Salah satu tokoh utama teori fungsionalis yang dikritik oleh Blau adalah Talcott Parsons. Jika Parsons berpendapat bahwa *human behavior* hanya dipengaruhi oleh sistem nilai individu, tidak demikian dengan Blau. Blau meyakini bahwa *human behavior* dipengaruhi oleh sistem nilai individu dan sistem lingkungan sosialnya (nilai masyarakat). Berikut pernyataan Blau:

“Social exchange can be observed every where once we are sensitized by this conception to it, not only in market relations but also in friendship and even in love, as we have seen as well as in many social relations between these extremes in intimacy.”

Blau mengatakan bahwa pertukaran sosial dapat diamati dalam kehidupan keseharian kita. Konsep ini tidak hanya dijumpai dalam *market relations* namun juga dalam hubungan pertemanan. Blau menjelaskan bahwa tidak semua perilaku manusia di bimbing oleh pertimbangan pertukaran sosial, tetapi Blau berpendapat demikian:

“Maus and other anthropologist have called attention to the significance and prevalence of the exchange of gifts and services in simpler societies. In theory such gifts and services in theory such gifts are voluntary but in fact they are given and repaid under obligation... further, what they exchange is not exclusively goods and wealth, real and personal property, and things of economic value. They exchange rather courtesies, entertainments, ritual, military asisten, women, children, dances, and feasts, and fairs in which the market is but one element and the circulation of wealth but one parta of a wide and enduring contact.”¹⁴

Dalam masyarakat yang paling sederhana, terjadi pertukaran sosial dalam bentuk *gift* dan *services*. *Gift* yang diterima tidaklah sukarela, namun diberikan di bawah *obligation*. Lebih jauh lagi, sesuatu yang dipertukarkan tidak hanya dalam bentuk *goods and wealth, real and personal property* dan *economic values*, namun juga kesopanan, hiburan, dan lain sebagainya.

Dalam teori pertukaran sosial menekankan adanya suatu konsekuensi dalam pertukaran baik yang berupa ganjaran materil, misal yang berupa barang maupun spiritual yang berupa pujian. Selanjutnya untuk terjadinya pertukaran sosial harus ada persyaratan yang harus dipenuhi. Syarat itu adalah: a) suatu perilaku atau tindakan harus berorientasi pada tujuan-tujuan yang hanya dapat tercapai lewat interaksi dengan orang lain; b) suatu perilaku atau tindakan harus bertujuan untuk memperoleh sarana bagi pencapaian tujuan-tujuan yang dimaksud.

Adapun tujuan yang dimaksud dapat berupa ganjaran atau penghargaan intrinsik yakni berupa pujian, kasih sayang, kehormatan dan lain-lainya atau penghargaan ekstrinsik yaitu berupa benda-benda tertentu, uang, dan jasa.

Harapan-harapan yang akan diperoleh dalam pertukaran sosial menurut Blau yaitu: a) ganjaran atau penghargaan; b) lahirnya diferensiasi kekuasaan, c) kekuasaan dalam kelompok; d) keabsahan kekuasaan dalam kelompok. Blau berpendapat bahwa: a) individu-individu dalam kelompok-kelompok yang sederhana (mikro) satu sama lain dalam pertukaran sosial mempunyai keinginan untuk memperoleh ganjaran ataupun penghargaan; b) tidak semua transaksi sosial bersifat simetris yang didasarkan pada pertukaran sosial yang seimbang.

Menurut Blau, terdapat empat tipe nilai yaitu: a) nilai-nilai yang bersifat khusus berfungsi sebagai media bagi kohesi dan solidaritas sosial; b) ukuran-ukuran tentang pencapaian dan bantuan yang bersifat umum melahirkan sistem stratifikasi sosial; c) sebagaimana dapat dilihat, nilai-nilai yang disyahkan itu merupakan medium pelaksanaan wewenang dan organisasi-organisasi usaha-usaha sosial bersekala besar untuk mencapai tujuan-tujuan kolektif; dan d) gagasan-gagasan oposisi adalah media reorganisasi dan perubahan, oleh karena hal ini dapat menimbulkan dukungan bagi gerakan oposisi dan memberi legitimasi bagi kepemimpinan mereka.¹⁵ Berikut komentar Blau:

“Social exchange differs in important ways from strictly economic exchange. The basic and most crucial distinction is that social exchange entails unspecified obligations. The prototype of an economic transaction rests on a formal contract that stipulates the exact quantities to be exchanged... Social exchange in contrast, involves the principle that one person does no another a favor, and while there ia a general expectation of some future return, its exact nature is definitely not stipulated in advance.”¹⁶

Meski interaksi yang dilakukan dalam pertukaran sosial relatif sama dengan interaksi bisnis dalam pertukaran ekonomi, namun amat berbeda dalam hal kewajiban. Jika kewajiban dalam pertukaran ekonomi lebih spesifik, maka kewajiban dalam pertukaran sosial tidak spesifik. Ini hal mendasar yang membedakan antara pertukaran sosial dengan pertukaran ekonomi. Terkait hal ini Blau mengatakan:

“In small groups, face to face interaction occurs between most members. In large face to face is rare and therefore the scheme of behaviorist theory does not to apply.”

Dalam konteks sosial dan interaksi, Blau berpendapat bahwa interaksi sosial berkembang pertama kali dalam kelompok sosial. Dalam kelompok kecil, interaksi yang terjadi bersifat *face to face*. Namun, dalam kelompok yang lebih besar amat jarang. Teori Blau sangat jelas melihat hubungan-hubungan dalam pilihan. Seperti dikatakan oleh Blau bahwa seorang individu merasa tertarik satu sama lain kalau dia mengharapkan sesuatu yang bermanfaat bagi dia sendiri karena hubungan itu. Proses pertukaran dalam kelompok kecil memang cenderung bersifat sederhana dibandingkan dengan kelompok yang lebih besar. Sebab dalam kelompok yang lebih besar banyak sekali pertukaran yang bersifat tidak langsung dan bersifat lebih kompleks. Proses internalisasi akan nilai-nilai dan norma-norma yang cocok, menjadi lebih penting dalam membentuk perilaku dan pola interaksi dari persetujuan pertukaran yang dirembukkan untuk satu tujuan tertentu.¹⁷ Pertukaran sosial tidak tunduk pada negosiasi dan tawar menawar yang disengaja seperti dalam ekonomi. Pada akhirnya proses dari *social attraction* menuju pada proses pertukaran sosial, dengan tahapan sebagai berikut:

1. Individu yang menerima layanan dari orang lain merasa memiliki hutang dan berkewajiban untuk membayar kembali.
2. Pelayanan bermanfaat yang diterima oleh seseorang dari pihak lain adalah pelayanan yang membuatnya merasa berkewajiban untuk membalasnya.
3. Wujud penghormatan dari pihak yang menerima layanan adalah dalam bentuk pelayanan yang memiliki keuntungan sebagai ganti pada pihak pemberi layanan.
4. Kedua pihak masing-masing memberikan layanan yang nilainya lebih dari yang diterima untuk menyediakan insentif (meningkatkan penawaran mereka) dan menghindarkan diri dari hutang.

Pertukaran sosial yang dimaksudkan oleh Blau ialah terbatas pada tindakan-tindakan yang bergantung pada reaksi-reaksi penghargaan dari orang lain dan berhenti apabila reaksi-reaksi yang diharapkan itu tidak kunjung muncul.¹⁸

C. Motif Agama dalam Aktivitas Politik di Seberang Kota Jambi

Peneliti memahami setelah menyimak teori Karl Marx mengenai agama, menurutnya “[a]gama tidak lain adalah candu yang membius kehidupan masyarakat dan bahkan menjadi alat justifikasi pemilik modal dan *power* dalam mengeksploitasi kelas pekerja.”¹⁹ Jika mengacu kepada teori ini, peneliti melihat bahwa dalam agama tersimpan potensi yang luar biasa untuk mempersuasi masyarakat. Dengan kekuatannya inilah kemudian para pemilik

kekuasaan atau dalam konteks penelitian ini adalah para kandidiat politik mencoba memanfaatkan agama sedemikian rupa untuk mengendalikan kelompok masyarakat yang menjadi target dan sasaran politiknya.

Hal ini tidak bisa dihindari karena sebagaimana Goldziher katakan “di dalam suatu masyarakat yang berlandaskan agama, pertimbangan-pertimbangan keagamaan pasti akan memasuki wilayah-wilayah politik dan masalah-masalah politik akan mengambil bentuk isu-isu keagamaan.”²⁰

Hal senada juga diungkapkan oleh TI mengenai mengapa agama, khususnya agama Islam menjadi suatu cara untuk menarik simpul massa dalam kegiatan politik di Seberang Kota Jambi. Ternyata hal ini tidak terjadi secara kebetulan, melainkan memang ada logika yang bermain disana. Berikut ini penjelasan TI selengkapnya:

“Dikarenakan masyarakat Seberang Kota Jambi adalah mayoritas Islam, maka menjadi lumrah ketika dimensi Islam itu dimanfaatkan sebagai sarana politis dalam menarik massa.”

Masyarakat di Seberang Kota Jambi merasa kebingungan dengan adanya gejala orientasi partai-partai politik saat ini. Disatu sisi lahir kecenderungan politik alokatif yang rasional. Namun disisi lain, politik aliran atau keagamaan muncul kembali lengkap dengan simbol-simbol keagamaan sehingga, keterlibatan agama dalam politik hanya sebatas pertukaran kepentingan. Hal ini dilatari oleh “nilai tukar” agama yang masih menjanjikan untuk meraup massa. Teriakit hal ini Hakim menjelaskan: “[S]ementara diantara sebagian masyarakat yang lain beranggapan partai-partai agama adalah sah dan cukup relevan untuk ditawarkan bagi masyarakat Indonesia yang beridentitas agama Islam. Maka isu-isu agama masih sangat mungkin untuk menarik minat calon pemilih demikian pula penggunaan simbol-simbol keagamaan.”²¹

Menurut MFK²² dalam satu wawancara kepada peneliti mengatakan bahwa ada berbagai macam motif dibalik masuknya aktivitas politik ke dalam ruang-ruang keagamaan. Satu di antaranya adalah motif agar oknum politisi mudah untuk dipercaya oleh publik dan meningkatkan elektabilitasya. Berikut ini pernyataan MFK selengkapnya:

“Jadi memang tokoh-tokoh politik ini sekarang ini, apa namanya itu, sering memakai nama agama. Memang kalau sudah nama agama itu dipakai, orang percaya. Jadi orang percaya ketika agama itu dipakai. Dengan sendirinya orang *kan* bisa hatinya itu apa namanya itu bisa hatinya itu kan tergugah untuk apa namanya itu membantu orang itu dengan agama.”²³

Jadi terjadinya kegiatan politik yang memasukan unsur dan simbol agama ke dalam setiap aktivitasnya bukan terjadi begitu saja, melainkan ada kepentingan politik dan pemanfaatan potensi agama. Sehingga sampai sekarang hubungan antara keduanya; yakni agama dan politik ini masih berlangsung.

Elit Politik Ambisius

Ambisi kekuasaan dan jabatan dalam level apapun merupakan sesuatu yang tabu, karena ia ditunggangi bahkan dikendalikan oleh ego diri yang membutuhkan mata hati. “[d]an cenderung menghalalkan segala cara sehingga bisa mengotori amanat suci politik itu sendiri.”²⁴

Menurut Bahrul Ulum, mengutip pendapat Azyumardi Azra mengatakan bahwa “[B]anyaknya partai Islam bermunculan didorong oleh keinginan para *elite* Islam untuk mendapatkan kekuasaan daripada didorong oleh alasan-alasan yang murni keagamaan.”²⁵

Pada dasarnya peneliti setelah mengamati situasi hubungan agama yang cenderung terjadi pertukaran guna memenuhi kepentingan-kepentingan politik tidak terlepas dari filosofi egoisme yang merupakan salah satu mazhab etika (filsafat moral), dimana logika egoisme ini mengambil bentuk tindakan atau perbuatan yang paling baik adalah yang memberi hasil atau manfaat bagi diri sendiri untuk jangka waktu selama diperlukan atau dalam waktu yang lama. Turunan dari filsafat egoisme tersebut akan melahirkan pemikiran atau ideologi hedonisme religius bagi para elit politik yang bersangkutan.

Ambisi merupakan sikap yang kurang baik jika dilakukan dengan berlebihan. Ambisi politik mengakibatkan individu menjadi lupa akan makna pentingnya berpolitik itu sesuai dengan kaidah dan pedoman agama. Untuk itulah, setiap individu perlu benar untuk memahami konsep pokok dalam agama itu yakni: tauhid, fiqh dan tasawuf. Apabila ketiga anasir ini dipahami dengan benar, termasuk para politikus, *insyallah* tidak akan terjadi eksploitasi agama untuk kepentingan politik. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh TI kepada peneliti dalam suatu kesempatan wawancara sebagai berikut:

“Kalau dikaji lebih dalam lagi, *kan* syariat ini mempelajari hukum-hukum *agamo*, yang secara *tigo* macam itu harus *dikuasoi*; tauhid, fiqh, dan tasawuf. Jadi, syariat itu *kan* untuk memberitahu sebagai dasar dari landasan *daripado* amaliyah *kito*. Jadi, syariat itu pada dasarnya *adolah* untuk membersihkan anggota daripada jasad *kito* ini. Kemudian *tariqat* membersihkan hati *kito*. Kemudian hakikat untuk membersihkan ruh *kito*. Itu penjabarannya dalam itu. Kalau itu sudah tertanam, artinya *kan* sudah *kaffah*. Maka semua yang *dilakukanyo*, *makanyo*, *Islam*. *Politiknyo*, *Islam*. *Rumahnya*, *Islam*. Segala perbuatan *kito* itu, *agamo* menjadi hakim. Kemudian mati sebagai istirahat daripada kejahatan.”²⁶

Ambisius ini adalah sifat yang kurang baik. Acapkali orang yang ambisius akan berakhir dan berdampak kurang baik pula. Sehingga terjadilah perilaku politik yang menyimpang, walaupun secara kasat mata figur dan partai adalah berbasis agama. Hal ini sebagaimana pendapat TI sebagai berikut:

“...Kemudian biaya politik ini mahal. *Itu nak* dibayar *galonyo*. *Itu-kan* akibatnya seperti Nazaruddin, Anas, Menpora, *segalo macam* itu yang paling banyak menteri *agamo*. Presiden PKS, *sayo* ikuti *galo* itu. *itukan* orang-orang yang kuat agama. *Ini kan* akibat ketidakikhlasan dalam berpolitik. Juga terlalu ambisi sehingga menemui kegagalan.”²⁷

Demikianlah uraian TI di atas yang menjelaskan penyebab lahirnya pertukaran kepentingan yang terjadi di antara politik dan agama di Seberang Kota Jambi saat ini.

Agama sebagai Alat Rekrutmen Politisi

“Kepada masyarakat, dia (masyarakat) harus bisa memilah mana ulama yang sebenarnya ulama itu. *Ado* ulama yang *su’*. Ulama *su’* itu adalah ulama yang *kulitnyo bae*. Macam bunglon: *biso* loncat *sano situ*. Kan *kito baco* sejarah Jambi ini *kan* jatuhnya dari situ. Dari politik inilah. *Sebenarnyo* orang politik ini terlalu kejam *jugo* untuk itu. tapi ulama ini tidak terpikir dan tergiur *segalo* macam.”²⁸

Lemahnya kontrol sosial yang dilakukan oleh para ulama ini dapat diindikasikan dengan beberapa kejadian-kejadian yang dimuat di media massa tentang peranan ulama. TI menangkap hal tersebut kemudian mengungkapkan penjelasannya sebagai berikut kepada peneliti:

“Ini kalau *kito* lihat di TV, itu *kan* masalah babi itu *be* sampai hari ini *dak do* selesai. Jadi itu *kan artinyo*, MUI pusat itu *beradu* dengan pakar-pakar hukum *segalo* macam ini. Kapsul itu *lah* lamo *kito* makan. Ini *lah ado pulak* babi. Jadi ulama ini kalau *sayo* lihat sudah kewalahan juga ini. Kemudian masalah patung di dalam perumahan. *Mako cubo awak* (peneliti) *tengok kini tu*. *Dak lamo* kami sudah musyawarah, *ado limo* itu di Perumahan Buluran, *limo kudo* itu. Jadi, pendapat ulama ini *dak* di *anu* (dengar) orang. *Dak do* di gubris. Inilah ulama tadi. *Seharusnyo* ulama dan *umara* (penguasa) duduk *bersamo supayo* didengar dan *ado* kekuatan.”²⁹

Lebih lanjut kelemahan kaderisasi ini juga dikomentari oleh SY yang menyesalkan adanya kader-kader partai yang tidak berkompetensi di bidang agama, padahal mereka sendiri berkecimpung dalam partai yang berasaskan Islam. Berikut ini adalah pernyataan SY³⁰:

“...*Dak ado*. Malah yang *ado* itu SE, S. Pd, dan *jugo dio be* *titel taroklah* sarjana IAIN, *dak biso dio be* dalil *be* hadits. Itu *sebenarnyo* cakap itu *biso* dikonsep, *biso dianukan* buat lampiran. *Cubo* lihat! Maaf *cerito*, di PPP *dak ado* yang *tukang baco* doa padahal disitu *basisnyo*. *justeru* itulah. Jadi tidak *agamo dak dio*. Hanyo *dio* cenderung *be* nak masuk PPP. *Kareno* lowongan *dak ado*.”³¹

Peneliti setelah menyimak pendapat dari SY di atas, dapat suatu informasi bahwa hari ini tidak ada lagi kaderisasi dalam tubuh partai, sehingga siapa calon yang memiliki kekuatan finansial, bisa saja maju untuk diusung oleh partai politik tertentu. Sebagaimana kasus dalam tubuh salah satu partai Islam di Seberang Kota Jambi ini misalnya, para caleg-nya tidak memiliki dasar keagamaan yang mumpuni, bahkan untuk memimpin doa dan ceramah pun tidak mampu. Kondisi ini kalau ditarik lebih jauh lagi, akan membawa kepada satu kewajaran apabila para caleg yang ada pada akhirnya tidak segan-segan memanfaatkan agama ini untuk kepentingan politik, sebab hal ini didukung oleh pemahaman keagamaan yang minim.

Ulama sebagai Juru Kampanye

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah seorang informan yaitu MFK. Beliau menjelaskan bahwa saat ini terdapat fenomena kiyai-kiyai dilibatkan MFK menjelaskan sebagai berikut:

“...Jadi kalau kita lihat sekarang ini, sebenarnya salah kalau politik itu menggunakan agama untuk kepentingan dunia. Agama ini yang digunakan untuk kepentingan akhirat boleh. Kalau digunakan untuk kepentingan dunia, jangan sebut nama agama. Dunia sama dunia-*lah*. Politik sama politik-*lah*. Jangan ‘menjual’ orang agama. Kadang-kadang itu, kiyai-kiyai *ditebengkan* disitu. Atau juga kalau mau apa namanya itu *yah* mau apalah mencari suara itu datang kerumah kiyai itu. Itu sebenarnya *dak* bagus. Kalau dibantu kiyai itu enak. Boleh dibantu. Itukan lain urusan. Tapi kalau membantu untuk urusan politik, *nah* itu sangat menyedihkan sekali. Jadi seolah-olah agama ini *diperjualkan*. Padahal agama *dak ado* boleh *diperjualkan*. *Dak* boleh diperalat agama itu sebenarnya. Itu yang zaman sekarang ini. Jadi kalau mau apa itu mendekati pemilihan umum, mulai mendekati kiyai-kiyai kalau tidak pemilihan umum, jauhlah dari kiyai-kiyai”³²

Hal senada juga diungkapkan oleh TI. Bahwa yang terjadi saat ini banyak dijumpai ulama-ulama yang terlibat dalam kegiatan partai politik. Padahal rusaknya atau baiknya negara ini bergantung kepada hubungan antara ulama dan *umara* inilah. Tetapi sayangnya, hubungan antara ulama dan *umara* saat ini diikat oleh suatu pertukaran kepentingan. Sehingga hubungan ini hanya sebatas pertukaran kepentingan dan klise belaka. Bukan hubungan yang menyetatkan. Berikut komentar TI:

“*Sayo kiro* perilaku politikus. Ini *kan* sebab rusaknya *negaro* ini sebab *duo* inilah. Kalau *duo* ini baik, maka baiklah. Yakni ulama dan *umara*. ulama tidak bisa meninggalkan *umara* sebab dia harus memayungi *umara*. Sedangkan *umara* tidak boleh meninggalkan ulama, karena dia bisa tersesat. Jadi jangan sampai memeralat ulama. Ini *jugo* harus *ado* batasnyo. Ulama *jugo* jangan mentang-mentang gaya-gaya ulama *segalo* macam. Ini *kan* menjual agama. *Dak* boleh, *ado* batasnya itu.”³³

Ada batasan dalam pemahaman TI tentang batasan etik seorang ulama dalam ruang politik adalah ulama itu tidak mengumbar diri dengan perkataan-perkataan yang tidak jujur guna meningkatkan elektabilitas seorang tokoh atau kandidat lewat kefiguran dia sebagai tokoh ulama dan tokoh masyarakat. Karena hal itu sama saja dengan pembodohan masyarakat. Intinya adalah ulama harus membatasi diri dan menjaga sikapnya sebagai ulama. Berikut pernyataan TI:

“Ulama *jugo sayo kiro* naik mimbar untuk pilihlah ini menurut sayo kurang baik. Itukan menimbulkan opini publik yang melihat *dio* karena ini *awang* *kan dio* melihat kiyai ini *kan* sehingga dia *ngikut*. Nah itu jadi, seolah-olah *dio* jadi duta *pulak* disitu. Jadi, *kalu* dapat, ulama *dak usahlalah* ikut-ikut naik mimbar. *Kito* tetap pakai prinsip Hamka, ulama itu *kan macam* payung. Tinggi sekali, berteduh bolehlah, silahkan. Tetapi tidak memunculkan diri. Kharisma ulama itu disitu, cukup memeberikan nasihat dan tidak perlu memunculkan diri”³⁴

Menyimak apa yang disampaikan oleh TI dalam satu kesempatan wawancara dengan peneliti. Beliau menjelaskan bahwa peran ulama ternyata sangat penting dalam hal sebagai media *gate vooter* untuk mendulang suara. Jadi ulama tidak hanya diperlakukan sebagai tempat untuk sungkem saja, melainkan juga dieksploitasi untuk mendapatkan elektabilitas melalui kharismatik ulama tersebut. Berikut uraiannya:

“Ulama di Jambi, atau di Seberang Kota Jambi terutamanya, itu jarang masuk partai. Tetapi anggota dewan, caleg umpamanya, tetap ia akan *bersoan* (sungkem) dulu kepada ulama. Misalnya minta doa, minta petunjuk, minta arahan, minta bimbingan, itu biasa. Dan pengaruhnya ketika ulama dijadikan sebagai *gate vooter* untuk mendulang suara sangat berpengaruh.”³⁵

Lebih lanjut, JI membeberkan kepada peneliti tentang bagaimana hubungan politikus dengan ulama ini dengan sedemikian rupa ulama dijadikan sebagai figur yang mampu mempengaruhi calon pemilih lainya untuk memilih salah satu kandidat parpol dengan memanfaatkan ketokohan ulama tersebut. Sehingga hubungan antara ulama dan kandidat tidak erat, melainkan sebatas tukar-menukar kepentingan saja. Inilah yang mengikat relasi diantara dua kekuatan tersebut. Berikut penjelasan JI:

“Inilah logika yang masih bermain. Konteks sekarang, masih berpengaruh ulama. Ulama di Seberang Kota Jambi ini juga masih berpengaruh. Umpama dia guru mesjid, ada putera dari lingkungannya, dan dia aktif. Guru mesjid itu sangat suka dengan dia, maka ulama akan mempromosikan dia. Biasanya itu *diikutin*. Walaupun tidak 100% tetapi 50% ikut. Inilah fenomenanya. Ini tidak mengenal kelas ekonomi menengah, atas, atau bawah. Karena kultur di Seberang Kota Jambi ini sistem kekeluarganya masih kuat. Walaupun diperumahan elit. Menengah di atas, itu berpengaruh juga. Tetap dia bersandar kepada ulama. Dia berbasis di As’ad. Dia adalah salah satu tokoh NU, dan dia punya guru-guru yang menjadi panutan dia. Dan dia akan ada jaringan disitu. Penopangan *lah*.”³⁶

Peneliti mendapatkan informasi yang menarik mengenai fenomena ulama sebagai juru kampanye. Dalam kasus ini, beliau adalah figur yang berlatarbelakang sbegai ustadz yang juga ikut *nyaleg* pada fase pemilihan tahun yang silam. Artinya disini, yang menarik adalah bahwa dia sendiri yang katakanlah mengandalkan pamornya sebagai ulama yang memiliki citra religiusitas, ternyata kalah dalam pemilihan.

D. Penutup

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat peneliti simpulkan beberapa hal penting sebagai berikut: *Pertama*, Motivasi memasukan agama ke dalam aktivitas politik di wilayah Seberang Kota Jambi adalah demi kepentingan kekuasaan. Hal ini ditenggarai dilatarbelakangi oleh: ambisi para elit politik, proses rekrutmen politik, mentalitas pragmatis dari sebagian oknum politisi di Seberang Kota Jambi. di samping itu, komodifikasi agama dalam ruang politik yang terjadi di Kota Jambi ini juga dilatari oleh faktor sosiologis masyarakat Seberang Kota Jambi yang masih kental dengan suasana Islami, sehingga dengan demikian sangat memungkinkan untuk terjadinya pertukaran kepentingan politik dan agama. *Kedua*, Komodifikasi agama dalam ruang politik di Seberang Kota Jambi mengambil bentuk seperti: pencitraan politik, ulama menjadi *gate vooter*, eksploitasi ruang keagamaan publik, arus mudik politik, silaturahmi politik, *infaq* politik, teks keagamaan ditumpang denan unsur politik, dan simbol-simbol agama dalam ruang politik. *Ketiga*, Komodifikasi agama dalam ruang politik akan membawa dampak seperti: politik ideologi, formalisasi Islam, perlambatan pendewasaan politik, desakralisasi nilai-nilai universalitas agama.

Catatan:

¹ Muhammad Abduh, *Risalah Tauhid* terjemahan oleh: Firdaus A.N (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), hal. 164. Silahkan lihat pula Burhanuddin Salam, *Pengantar Filsafat* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hal. 176

² Roz, *Ramadhan, Kandidat Tebar Pesona: Kegiatan Silaturahmi Meningkatkan “Jambi Ekspres, Edisi 02 Februari 2013”* Kolom Politik

³ Observasi pada hari Sabtu, 19 Juli 2013

⁴ Observasi pada hari Senin, 03 Juni 2013

⁵ Webster’s New World Encyclopedia, (1992), hal. 226

⁶ I Made Sariyatna, dkk., *Pengaruh Komodifikasi Budaya Terhadap Tingkah Laku Masyarakat Bali* dalam <http://fkipunmas.blogspot.com/2012/12/pengaruh-komodifikasi-budaya-terhadap.html>

⁷ Syaiful Halim, *Komodifikasi Anas Urbaningrum di Televisi dalam* <http://media.kompasiana.com/mainstream-media/2013/03/06/komodifikasi-anas-urbaningrum-di-televisi-540447.html> hal. 2-3

⁸ Mohammad Fakhruroji, *Privatisasi Agama: Globalisasi dan Komodifikasi Agama* (Bandung: Jurnal Dakwah dan Komunikasi UIN SGD Bandung, 2005), hal. 206

⁹ Hari Triwibowo, *Wacana Pengantar Jual Beli Identitas Islam* dalam <http://htriwibowo.wordpress.com/2012/12/21/opini-masyarakat-simbolis/#more-342>

¹⁰ Pattana Kitiarsa, *Religious Commodification in Asia: Marketing God* (London: Routledge, 2008), hal. 6

¹¹ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hal. 780

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Michael Peter Blau, *Exchange and Power in Social Life* (New York: Wiley and Sons, 1964), hal. 89

¹⁵ *Ibid.*, hal. 90

¹⁶ *Ibid.*, hal. 93

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Mohammad Tahir Kasnawi, Sulaiman Hasan, dan Suratman Nur, *Perubahan Sosial dan Pembangunan* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2000), hal. 15

²⁰ Ignaz Goldziher, *Introduction to Islamic Theology and Law* translated by Andras and Ruth Hamori (Princeton: Princeton University Press, 1981), hal. 168

²¹ Muhammad Nur Hakim, *Pemaknaan Agama Dalam Partai politik Dalam Konteks Reformasi Studi Perbandingan PPP, PKB, dan PAN* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2000), hal. 62

²² MFK adalah salah satu informan dalam penelitian ini. Beliau berstatus sebagai Ketua MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kecamatan Pelayangan, Kota Jambi. Beliau juga merupakan tenaga pendidik di Madrasah Nurul Iman, juga mengajar di Tarbiyatul Tadiin di Kampung Arab Melayu. Beliau juga pernah mengajar di Tahsinul Qura.

²³ Ketua MUI Kecamatan Pelayangan, MFK, Wawancara, 15 Desember 2013, Kota Jambi, Recorder, Simbol Agama Dalam Ruang Politik.

²⁴ Ayi Sofyan, *Etika Politik Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hal. 346

²⁵ Bahrul Ulum dan Hermanto Harun, *Op. Cit.*, hal. 119

²⁶ Rais Muallim Madrasah Nurul Iman, TI, Wawancara, 16 Desember 2013, Seberang Kota Jambi, Recorder, Agama Sebagai Rujukan Berpolitik

²⁷ Rais Muallim Madrasah Nurul Iman, TI, Wawancara, 16 Desember 2013, Seberang Kota Jambi, Recorder, Pandangan Umum Politik di Seberang Kota Jambi

²⁸ Rais Muallim Madrasah Nurul Iman, TI, Wawancara, 16 Desember 2013, Seberang Kota Jambi, Recorder, Koreksi Terhadap Ulama dan Tokoh Masyarakat

²⁹ Rais Muallim Madrasah Nurul Iman, TI, Wawancara, 16 Desember 2013, Seberang Kota Jambi, Recorder, Memperbaiki Hubungan Ulama dan Umara

³⁰ SY adalah seorang kader solid PPP dan sudah maju dalam pemilihan legislatif sebanyak tiga kali, walaupun belum pernah menang dan tahun ini adalah keikutsertaannya yang ketiga kalinya. Beliau adalah tamatan Ponpes As’ad dan aktif juga dalam kegiatan keagamaan seperti memimpin tahlil dan imam masjid.

³¹ Caleg PPP 2014, SY, Wawancara, 23 Desember 2013, Seberang Kota Jambi, Recorder, Latar

Belakang Kader PPP

³² Ketua MUI Kecamatan Pelayangan MFK, Wawancara, 15 Desember 2013, Seberang Kota Jambi, Recorder, Simbol Agama Dalam Ruang Politik

³³ Rais Muallim Madrasah Nurul Iman, TI, Wawancara, 16 Desember 2013, Seberang Kota Jambi, Recorder, Perilaku Politikus Kota Jambi

³⁴ Rais Muallim Madrasah Nurul Iman, TI, Wawancara, 16 Desember 2013, Seberang Kota Jambi, Recorder, Ulama dan Kampanye

³⁵ Politisi Golkar, JL, Wawancara, 19 Desember 2013, Seberang Kota Jambi, Recorder, Alasan Politisi Sungkem Kepada Ulama

³⁶ Politisi Golkar, JL, Wawancara, 19 Desember 2013, Seberang Kota Jambi, Recorder, Alasan Politisi Sungkem Kepada Ulama

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Muhammad. *Risalah Tauhid* terjemahan oleh: Firdaus A.N. (Jakarta: Bulan Bintang, 1979).
- Amir Piliang, Yasraf. *Posrealitas: Realitas Kebudayaan Dalam Era Postmetafisika*. (Yogyakarta: Jalasutra, 2004).
- Aziz al-Badri, Abdul. dan Mujio, *Politik Ulama Dalam Menghadapi Penguasa Islam*. (Bandung: Pustaka Setia, 2005).
- Basyaib, Hamid. *Mengapa Partai Islam Kalah*. (Jakarta: AlVabet, 1999).
- Berger, Peter. *The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion*. (New York: Doubleday and Company, 1969).
- Blau, Michael Peter. *Exchange and Power in Social Life*. (New York: Wiley and Sons, 1964).
- Chatib, Adrianus. *Kenapa Bangsa Ini Sampai Hari Masih Seperti Ini: Kritik Konstruktif dan Gagasan Otentik dalam Realitas dan Akuntabilitas*, (Jambi: Sulthan Thaha Press, 2012).
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1998).
- Fakhruroji, Mohammad. Privatisasi Agama: Globalisasi dan Komodifikasi Agama. *Jurnal Dakwah dan Komunikasi UIN SGD Bandung*, 2005.
- Goldziher, Ignaz. *Introduction to Islamic Theology and Law* translated by Andras and Ruth Hamori. (Princeton: Princeton University Press, 1981).
- Jenkins, Richard. *Membaca Pikiran Fiere Bourdieu*. (Yogyakarta: Kreasi Budaya, 2004).
- Kasnawi, Mohammad Tahir. Sulaiman Hasan, dan Suratman Nur, *Perubahan Sosial dan Pembangunan*. (Jakarta: Universitas Terbuka, 2000).
- Kitiarsa, Pattana. *Religious Commodification in Asia: Marketing God*. (London: Routledge, 2008).
- Lubis, Muchtar. *Manusia Indonesia*. (Yogyakarta: Yayasan Obor, 2001).
- Muhammad, Mahatir. *Dilema Melayu*. (Jakarta: Sinar Harapan, 1985).
- Nur Hakim, Muhammad. *Pemaknaan Agama Dalam Partai politik Dalam Konteks Reformasi Studi Perbandingan PPP, PKB, dan PAN*. (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2000).
- Pahmi, *Politik Pencitraan*. (Jakarta: Gaung Persada Press, 2010).
- Salam, Burhanuddin. *Pengantar Filsafat*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2005).
- Sofyan, Ayi *Etika Politik Islam*. (Bandung: Pustaka Setia, 2012).
- Sunanto, Musrifah. *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).
- Weber, *From Max Weber: Essays in Sociology* Translated and edited by H. H. Gerth and C. Wright Mills. (New York: Oxford University Press, 1958).
- Roz, *Ramadhan, Kandidat Tebar Pesona: Kegiatan Silaturahmi Meningkatkan "Jambi Ekspres, Edisi 02 Februari 2013" Kolom Politik*

Sumber Daring:

- Azhar, Muhammad. *Relasi Agama Dalam Perspektif Muhamad Arkoun* dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id/8517/1/MUHAMMAD%20AZHAR%20RELASI%20AGAMA%20DAN%20NEGARA%20DALAM%20PERSPEKTIF%20MOHAMMED%20ARKOUN.pdf> diakses pada pukul 16:35 tanggal 07 Januari 2014.
- Ghazali, Adeng Mukhtar Islam Politik di Indonesia <http://amgy.wordpress.com/2008/02/08/islam-politik-di-indonesia/>
- Halim, Syaiful Komodifikasi Anas Urbaningrum di Televisi dalam <http://media.kompasiana.com/>

- mainstream-media/2013/03/06/komodifikasi-anas-urbaningrum-di-televise-540447.html*
Muzadi, Hasyim. Papol Islam Hanya Eksploitasi Agama dalam [http:// nasional. kompas. Com /read /2013 /12/08/0736405 /Hasyim. Muzadi .Papol.Islam.Hanya.Eksploitasi. Agama](http://nasional.kompas.com/read/2013/12/08/0736405/Hasyim.Muzadi.Papol.Islam.Hanya.Eksploitasi.Agama) diakses pada pukul 13:00 WIB pada tanggal 07 Januari 2014
- Riau Pos, Eksploitasi Simbol dalam Politik Populer dalam <http://www.riaupos.co/1280-spesial-eksploitasi-simbol-dalam-politik-popular.html> diakses pada pukul 13:35 tanggal 07 Januari 2014
- Rozany, Achmad. Politik dan Eksploitasi Simbol Agama dalam <http://zanyfaperta.wordpress.com/2010/04/20/politik-dan-eksploitasi-symbol-agama/> diakses pada pukul 15:55 tanggal 07 Januari 2014
- Sariyatna, I Made dkk., *Pengaruh Komodifikasi Budaya Terhadap Tingkah Laku Masyarakat Bali* dalam <http://fkipunmas.blogspot.com/2012/12/pengaruh-komodifikasi-budaya-terhadap.html>
- Sariyatna, I Made dkk., *Pengaruh Komodifikasi Budaya Terhadap Tingkah Laku Masyarakat Bali* dalam <http://fkipunmas.blogspot.com/2012/12/pengaruh-komodifikasi-budaya-terhadap.html>
- Triwibowo, Hari. *Wacana Pengantar Jual Beli Identitas Islam* dalam [http:// htriwibowo. wordpress. com/2012/12/21/opini-masyarakat-simbolis/#more-342](http://htriwibowo.wordpress.com/2012/12/21/opini-masyarakat-simbolis/#more-342)
- Umar, Nasaruddin. "Antara Negara dan Agama" <http://www.depag.go.id>